

RENJA

BKPSDM

2024



BKPSDM Kab. Paser
Website Pemerintah Kab.
kepegawaian.paserkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser merupakan kewajiban dalam rangka menetapkan program dan kegiatan satu tahun sesuai dengan visi dan misi Kepela Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan mneyelaraskan tujuan, usulan/aspirasi masyarakat serta prioritas daerah melalui Forum Perangkat Daerah.

Kami sadar bahwa dalam dokumen ini masih jauh dari kekurangan sehingga atas segala saran dan kritik masukannya dari semua pihak kami ucapkan terima kasih semoga menjadi bekal bagi penyusunan Renja tahun berikutnya.

Tana Paser, 2 Agustus 2023

Kepala Badan,



Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PASER TAHUN 2019**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....20

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
BKPSDM Kabupaten Paser26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...34

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....37

3.3. Program dan Kegiatan39

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Paser	9
Tabel T-C.30	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	19
Tabel T-C.31	Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi	19
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 BKPSDM.....	29
Tabel 3.1.	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	31
Tabel 3.2.	Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2021	33
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.....	35
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 202	39

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menuangkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah sebagai wujud dari kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024 disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan
- f. Penetapan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Peraturan Bupati Paser nomor 25 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan pembangunan daerah menjadi tolak ukur penilaian kinerja BKPSDM Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun (2024).

Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai dasar untuk menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan tahun 2024 yang dituangkan ke dalam kebijakan BKPSDM berdasarkan analisa dari evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 serta sebagai dasar merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas BKPSDM beserta pagu indikatif dan target indikator kinerja tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terkandung dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Renstra BKPSDM
- 2.2. Analisis Kinerja BKPSDM

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.3. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

Indikator kinerja BKPSDM selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra BKPSDM tahun 2021-2026. Sasaran strategis tersebut antara lain :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah

Sasaran :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator :

- Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material BPK RI dan APIP Inspektorat target 0 temuan dengan realisasi tahun 2022 tercapai 100% dengan realisasi 0 temuan.
- Nilai SAKIP, target tahun 2022 adalah B (65) dan tahun 2022 tercapai dengan realisasi penilaian SAKIP B (63)

2. Tujuan 2 : Mewujudkan pengembangan kapasitas SDM yang professional, inovatif dan Berintegritas

Sasaran :

a. Meningkatkan kualitas tata kelola manajemen ASN

Indikator :

- Persentase ASN dengan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori baik (71-80) dengan target kinerja tahun 2022 60% tercapai dengan realisasi 70,60%.
- Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi dengan target kinerja 70% terealisasi 55,92%.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra BKPSDM 2021-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022 yang telah dilaksanakan, BKPSDM sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target yang tertuang dalam RKPD tahun 2022. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2022 dan

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Paser secara umum realisasi program dan kegiatan tahun 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lainnya

Indikator :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat B (70)

Capaian :

- a. Realisasi capaian target untuk indikator di atas melebihi target RKPD tahun 2023 B (77,65)

2. Program Kepegawaian Daerah

Indikator :

- a. Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan (70%)
b. Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan (70%)
c. Persentase pegawai berkinerja baik (100%)

Capaian :

- a. Realisasi capaian target untuk indikator di atas belum sesuai dengan target RKPD tahun 2022 (62,25%)
b. Realisasi capaian target untuk indikator di atas sudah tercapai sesuai dengan target RKPD tahun 2022 (83,78%)
c. Realisasi capaian target untuk indikator kinerja di atas belum memenuhi target RKPD tahun 2022 (90%)

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator :

- a. Persentase ASN manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi (70%)

Capaian :

- a. Realisasi capaian target untuk indikator kinerja ini telah memenuhi target RKPD (83,06%)

Dari ketiga indikator kinerja sasaran tersebut hanya 25% sasaran indikator kinerja strategis BKPSDM yang tercapai, meskipun demikian, rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebesar 96,88%. Untuk lebih jelasnya berikut tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2023.

Berdasarkan hasil laporan kinerja Perangkat Daerah tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser mampu menyerap anggaran sebesar 90,88% atau Rp. 15.211.736.357,00 (Lima belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus tiga

puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 16.738.775.398,00 (Enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

NO.	URAIAN	APBD Perubahan TA 2022		%	Realisasi APBD TA 2021
		Anggaran	Realisasi		
1.	Belanja Operasi	15.955.753.645,00	14.454.000.612,00	90.59	11.199.820.585,00
	Belanja Pegawai	5.240.837.130,00	4.648.285.402,00	88.69	4.540.480.572,00
	Belanja Barang dan Jasa	10.714.916.515,00	9.805.715.210,00	91.51	6.659.340.013,00
2.	Belanja Modal	783.021.753,00	757.735.745,00	96.77	588.324.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	783.021.753,00	757.735.745,00	96.77	588.324.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
	SURPLUS/DEFISIT	16.738.775.398,00	15.211.736.357,00	90.88	11.788.144.585,00

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tidka luput dari dukungan ketercapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit capaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaia indikator kinerja utama program dna kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

- Indikator kinerja program Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Pada tahun 2022, jumlah pagu dana untuk indikator kinerja program ini adalah Rp. 655.118.840,00 dengan realisasi sebesar Rp. 638.961.030,00 atau 110,77%. Realisasi kinerja kegiatan pada program ini adalah 114,52%. Penilaian indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan kepegawaian di BKPSDM dinilai dengan melakukan pengukuran kepuasan atas layanan kepegawaian meliputi pengadaan dan penerimaan CPNS dan PPPK, layanan pensiun, layanan kenaikan pangkat, layanan pengusulan pindah/mutasi, layanan penerbitan Kartu Pegawai, KARIS dan KARSU, layanan pengajuan rekomendasi ijin belajar, layanan pengajuan perceraian, layanan diklat atau pendidikan dan pelatihan, layanan kenaikan gaji berkala, layanan SKP, layanan LHKPN dan lain sebagainya.
- Indikator kinerja program jumlah temuan penyimpangan pengelolaan BMD dan keuangan yang material dari BPK RI dan APIP eksternal dengan realisasi 0 temuan, pengukuran ketercapaian indikator kinerja program ini dilihat dari jumlah temuan keuangan oleh BPK RI.

3. Indikator kinerja program Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan
Realisasi kinerja keuangan program ini sebesar Rp. 1.225.030.362,00 atau 83,40% dari total pagu Rp. 1.468.916.239,00. Kinerja indikator program ini diukur berdasarkan jumlah pegawai yang telah ditempatkan berdasarkan kualifikasi atau pendidikan dalam jabatan.
4. Indikator kinerja program Persentase ASN bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan. Realisasi kinerja program ini sebesar 86,56% dengan realisasi keuangan capaian indikator program ini sebesar 92,58%. Pengukuran indikator kinerja program ini dilihat dari jumlah pegawai yang berhasil ditempatkan berdasarkan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dalam jabatan.
5. Indikator kinerja program Persentase pegawai berkinerja baik
Dengan capaian realisasi kinerja keuangan sebesar 90,33% dan capaian realisasi kinerja sebesar 132,71%. Pencapaian indikator kinerja program ini didukung oleh kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pengelolaan pemberian penghargaan, pemberian tanda jasa dan pengelolaan disiplin pegawai.
6. Indikator kinerja program Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Pencapaian indikator kinerja program ini didukung oleh kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dengan rincian kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dasar atau latsar.

Dalam penilaian terhadap hasil evaluasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 terdapat perbedaan indikator kinerja hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian nomenklatur atau penyeragaman indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C. 29 a (sebelum review) dan b (dokumen Review Renstra sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 45 tahun 2023).

T-C.29a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan Tahun 2022

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	-	-	0 (70)	0 (77,54)	100,77%	-	-	-
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Milai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	0 (65)	0 (63)	96,92%	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renwil Renja, Rencangan Renja, Renja, Renja Perubahan)	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKJP, Evaluasi Renja, SPRP, Rencana Aksi, IKU dan IK, Tepas, SPRUP, LPPD, Ek Renstra dan Evaluasi RPJMD)	-	-	10 dokumen	10 dokumen	100%	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	-	-	0 (70)	0 (76,57)	109,38%	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	6 paket	6 paket	100%	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	0 paket	0 paket	100%	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	45 paket	45 paket	100%	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	10 paket	10 paket	100%	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	38 laporan	38 laporan	100%	-	-	-
Penyusunan Anjpa Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Anjpa Dinamis pada SKPD	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	-	-	100%	100%	-	-	-	-
Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang diterima	-	-	10 laporan	6 laporan	60%	-	-	-
Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	-	-	-
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD	-	-	0 (70)	0 (76,57)	-	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	200 dok	209 dok	104,50%	-	-	-
Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang diverifikasi	-	-	31 orang	31 org	100%	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelur yang diadakan	-	-	53 unit	53 unit	100%	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	-	-	3 unit	3 unit	100%	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan terbayarnya pajak kendaraan	-	-	4 unit	2 unit	50%	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	-	-	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	-	-	10 unit	10 unit	100%	-	-	-
Program Kepegawaian Daerah	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	-	-	80%	64,43	107,38%	-	-	-
	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan	-	-	70%	66,59%	86,56%	-	-	-
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah Bezzetinfoformasi yang diusulkan	-	-	75%	66,42	88,56%	-	-	-
	Persentase Data Kepegawaian yang lengkap dan akurat	-	-	90%	88%	75,55%	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi CPNS/PPPK	-	-	154 orang	155 orang	100,65%	-	-	-
	Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan Sumpah Jang ASN	-	-	250 orang	0 orang	0	-	-	-
	Jumlah administrasi pengangkatan CPNS dan PPPK yang terselesaikan	-	-	350 orang	0 orang	0	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Tepat Waktu	-	-	160 dokumen	188 dokumen	117,50%	-	-	-
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pembekalan	-	-	250 org	89 orang	35,60%	-	-	-
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Fasilitas kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana	-	-	1 lembaga	1 lembaga	100%	-	-	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang diikutkan, dikelola dan dipelihara	-	-	4 aplikasi	4 aplikasi	100%	-	-	-
Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase data Kepegawaian di perbarui	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
	Jumlah Kartu Tanda Pengenal ASN di Lingkungan Pemkab. Paser	-	-	800 kartu	517 kartu	64,50%	-	-	-
	Jumlah KARPEGKARISKARSUTASPEN yang telah diterbitkan di Lingkungan Pemkab. Paser	-	-	100 dokumen	403 dokumen	403%	-	-	-
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Rekonstruksi Data Kepegawaian di lingkungan Pemkab. Paser	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan	-	-	70%	62,25%	88,93%	-	-	-

Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	-	-	70%	42,25%	60,36%	-	-	-
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah fasilitasi kegiatan Assessment Center yang dilaksanakan	-	-	7 kali	3 kali	42,85%	-	-	-
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	-	-	40 org	100 orang	250%	-	-	-
	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Bimbingan Teknis (BMTEK)	-	-	34 org	196 orang	576,47%	-	-	-
	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Jazah (UPJ)	-	-	100 org	75 orang	75%	-	-	-
	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas (UDG)	-	-	171 org	162 orang	97,66%	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas belajar atau ipm belajar	-	-	70 orang	67 orang	95,71%	-	-	-
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	-	-	125 orang	362 orang	301,67%	-	-	-
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	-	10 dokumen	4 dokumen	40%	-	-	-
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	-	-	80%	60,59%	75,74%	-	-	-
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	-	-	400 dokumen	531 dokumen	132,75%	-	-	-
Pengelolaan Promosi ASN	Terselenggaranya Rapat Baperakal	-	-	6 rapat	4 rapat	66,67%	-	-	-
	Jumlah Calon JPT yang lulus Test Assessment Lelang JPT	-	-	24 orang	24 orang	100%	-	-	-
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah surat keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	-	-	600 dokumen	932 dokumen	155,50%	-	-	-
Program Kepogawean Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	-	-	100%	98%	98%	-	-	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan nilai SKP baik	-	-	73%	99,53%	132,70%	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi	-	-	4.634 SKP	3.732 SKP	80,53%	-	-	-
	Jumlah IWL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu	-	-	225 wajib lapor	250 wajib lapor	111,11%	-	-	-
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN yang direvisi	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Kenaikan Gaji Berkala PNS yang terselesaikan tepat waktu	-	-	1.600 dokumen	1.793 dokumen	112,06%	-	-	-
	Jumlah Peraturan Kepala Daerah ttg Pengawasan, Standarisasi Tambahan Penghasilan Pegawai / Tunjangan Kinerja yang ditetapkan	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan SLKS	-	-	403 orang	202 orang	50,50%	-	-	-

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	-	-	5 kasus	12 kasus	240%	-	-	-
Program Pengembangan SDM	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	-	-	70%	56,75%	81,93%	-	-	-
Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah calon ASN dan ASN yang telah memenuhi Diklat Penjurangan	-	-	90%	84,21%	93,57%	-	-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Pejabat yang mendapatkan pendidikan PKP, PKA dan PKN	-	-	57 orang	48 orang	84,21%	-	-	-
	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendapatkan pendidikan LATSAR	-	-	136 orang	129 orang	94,85%	-	-	-

Tabel T-C. 29 b
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan Tahun 2022

Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Laku (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian angket Renstra PD s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Program Pemunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Lainnya	B (74)	NA	B (76,61-88,30)	B (77,54)	118,77%	B (76,61-88,30)	B (78)	162,63
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAMP Perangkat Daerah	B (69-69)	CC (58,23)	B (68-69)	B (63)	96,92%	B (69-69)	B (67)	111,67%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dok	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	4 dokumen	5 dokumen	125
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja kinerja perangkat daerah	8 dok	-	10 dokumen	10 dokumen	100%	8 dokumen	12 laporan	150
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	B (76,61-88,30)	-	B (76,61-88,30)	B (76,57)	108,36%	B (76,61-88,30)	B (78)	162,63
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	-	6 paket	6 paket	100%	7 paket	6 paket	86,174
Penyediaan Perlengkapan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	20 unit	8 paket	8 paket	100%	8 paket	2 paket	25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	-	45 paket	45 paket	100%	45 paket	45 paket	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	10 paket	10 paket	100%	12 paket	4 paket	33,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	2 dokumen	2 dokumen	100%	12 paket	2 paket	16,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 kali	12 kali	38 laporan	38 laporan	100%	45 lap	40 laporan	88,89
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 jenis arsip	12 kali	1 dokumen	1 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100
Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Penertase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	25 laporan	12 laporan	10 laporan	8 laporan	80%	25 laporan	10 laporan	40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, jaringn informasi dan website BKPSDM yang terlayanan	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD	B (76,61-88,30)	-	B (76,61-88,30)	B (76,57)	108,36	B (76,61-88,30)	B (78)	162,63
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terpertasi	200 dok	-	200 dok	296 dok	148,50%	200 dok	223 dokumen	111,5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 org	-	31 orang	31 org	100%	31 org	33 orang	106,45
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Penertase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelkur yang disediakan	5 unit	-	10 unit	53 unit	100%	5 unit	14 unit	280
Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	8 unit	-	3 unit	3 unit	100%	8 unit	7 unit	87,5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Penertase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100

Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan personernya	4 unit	1 unit	4 unit	2 unit	50%	4 unit	4 unit	100
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 unit	12 unit	10 unit	10 unit	100%	7 unit	10 unit	142,85/1429
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	12 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	12 unit	10 unit	10 unit	100%	1 unit	1 unit	100
Program Kepegawaian Daerah	Persentase keausutan jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	80%	-	68%	64,43	107,38%	88%	78%	97,5
	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan	80%	-	78%	60,59%	86,56%	88%	78%	97,5
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah Berasidat/formasi yang diisikan	75%	-	75%	60,42	83,56%	75%	75%	100
	Persentase Data Kepegawaian yang lengkap dan akurat	90%	-	98%	68%	73,55%	98%	90%	100
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	100 dok	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN (sertifikat hasil pelaksanaan pembekalan)	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 lembaga	-	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan	80%	-	78%	62,25%	88,83%	88%	78%	97,5
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	80%	-	78%	42,25%	90,36%	88%	78%	97,5
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Pengelolaan Pendidikan Lapangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lapangan	70 orang	164 orang	-	-	-	70 orang	70 orang	100
Pemilihan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN fungsional yang dibina	120 orang	800 orang	-	-	-	120 orang	120 orang	100
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	50 orang	-	-	-	-	50 orang	20 orang	40
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	80%	-	88%	60,59%	73,74%	88%	78%	97,5
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi antar Daerah	400 dokumen	343 dokumen	400 dokumen	531 dokumen	132,75%	400 dok	600 dokumen	150
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
Pengelolaan Rangkaian Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat	800 dokumen	1000 dokumen	800 dokumen	932 dokumen	115,50%	800 dokumen	800 dokumen	100
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	100%	-	100%	98%	98%	100%	100%	100
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan nilai SKP baik	80%	-	75%	66,53%	132,70%	88%	100%	100
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4.900 dok	4.667 dokumen	4.634 SKP	3.732 SKP	80,53%	4.060 SKP	4.215 SKP	86,02
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1200 orang	566 orang	1.600 dokumen	1.793 dokumen	112,06%	1.200 dokumen	1.312 dokumen	109,33
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	400 orang	-	400 orang	202 orang	50,50%	400 orang	123 orang	30,75
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	1 dokumen	-	5 laporan	12 laporan	240%	1 laporan	1 laporan	100
		-	-						
Program Pengembangan SDM	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	86%	-	39%	36,75%	83,93%	89%	78%	87,5
Sertifikasi, Ketenagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah calon ASN dan ASN yang telah menerima Diklat Penjurangan	90%	-	96%	84,21%	93,37%	93%	90%	85,82
Pengelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Pejabat	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Pejabat yang mendapatkan pendidikan PKP, PKA dan PKM serta Calon Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan fasilitas pendidikan LATSAR)	320 orang	110 orang	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Pada Tabel diatas Terdapat Pencapaian target indikator yang melebihi dan dibawah target pencapaian, berikut penjelasannya

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Penjelasan Indikator yang melebihi dan dibawah target
		Target	Realisasi	(%)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan terbayarnya pajak kendaraan	4 unit	2 unit	50%	Terjadi perubahan jumlah unit kendaraan yang digunakan dalam Badan
Program Kepegawaian Daerah	<i>Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan</i>	60%	64.43	107.38%	
	<i>Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan</i>	70%	60.59%	86.56%	Belum bisa memenuhi target karena banyaknya pensiun tidak berbanding seimbang dengan jumlah penerimaan ASN
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah Bezzeting/formasi yang diusulkan</i>	75%	66.42	88.56%	Dari jumlah formasi yang diusulkan tidak semua dapat terpenuhi
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi CPNS/PPPK	154 orang	155 orang	100.65%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Tepat Waktu	160 dokumen	188 dokumen	117.50%	Terdapat penerbitan SK pensiun di luar prediksi seperti Pensiun Dini, dan meninggal dunia
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pembekalan	250 org	89 orang	35.60%	Dari 250 orang hanya 89 orang yang menghadiri acara pembekalan
	Jumlah Kartu Tanda Pengenal ASN di Lingkungan Pemkab. Paser	800 kartu	517 kartu	64.63%	Penetapan target hanya mengikuti target Renstra, sedangkan Mutasi Pegawai tidak dapat diprediksi
	Jumlah KARPEG/KARIS/KARSU/TASPEN yang telah diterbitkan di Lingkungan Pemkab. Paser	100 dokumen	403 dokumen	403%	
Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase ASN yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan</i>	70%	42.25%	60.36%	Peningkatan kompetensi belum melalui analisis kebutuhan diklat pegawai
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	40 org	100 orang	250%	Jumlah pegawai yang mengajukan diklat banyak, sedangkan biaya pelaksanaan masih bisa diminimalisasikan

	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Bimbingan Teknis (BIMTEK)	34 org	196 orang	576.47%	
	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI)	100 org	75 orang	75%	Dari 100 orang Pegawai yang mengajukan hanya 75 orang yang mengikuti pelaksanaan ujian
	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas (UDI)	171 org	167 orang	97.66%	Sda
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas belajar atau ijin belajar	70 orang	67 orang	95.71%	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	120 orang	362 orang	301.67%	Salah penetapan target
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 dokumen	4 dokumen	40%	6 dokumen lainnya masih dalam tahap penyelesaian
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 dokumen	531 dokumen	132.75%	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah surat keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	800 dokumen	932 dokumen	116.50%	Dokumen yang melebihi adalah dokumen kenaikan pangkat yang tertunda di tahun sebelumnya
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	100%	98%	98%	Data tidak sepenuhnya dapat ditarik di akhir tahun, masih banyak Pegawai yang belum menyelesaikan pelaporan SKP nya
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi	4.634 SKP	3.732 SKP	80.53%	Data tidak sepenuhnya dapat ditarik di akhir tahun, masih banyak Pegawai yang belum menyelesaikan pelaporan SKP nya
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Kenaikan Gaji Berkala PNS yang terselesaikan tepat waktu	1.600 dokumen	1.793 dokumen	112.06%	Kesalahan Penetapan target
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan SLKS	400 orang	202 orang	50.50%	Perubahan tata cara pengajuan dari manual menjadi online dilaksanakan hanya satu kali (sebelumnya dua gelombang) sehingga sekretariat-sekretariat OPD belum sigap menanggapi perubahan tersebut
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	5 kasus	12 kasus	240%	
Program Pengembangan SDM	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	70%	56.75%	83.93%	

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah calon ASN dan ASN yang telah memenuhi Diklat Penjenjangan</i>	90%	84.21%	93.57%	
Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Pejabat yang mendapatkan pendidikan PKP, PKA dan PKN	57 orang	48 orang	84.21%	
	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendapatkan pendidikan LATSAR	136 orang	129 orang	94.85%	Jumlah CPNS yang lulus tes hanya sebanyak 129 orang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser nomor 28 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser maka BKPSDM memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Paser dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Paser tahun 2021-2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan mendukung pada pencapaian Misi ke 2 RPJMD yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional dan Partisipatif dengan mengusung tujuan Perangkat Daerah yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas serta Sasaran RPJMD yakni Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara periodek. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebagaimana disajikan dalam tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
A.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat			B (70)	B (72)	B (70)	B (76)	B (77,54)	B (77)	BB (80)	BB (80)	-
1	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
1.1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Ranwal Renja, Rancangan Renja, Renja, Renja Perubahan)			5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	-
1.2.	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP, Evaluasi Renja, SPIP, Rencana Aksi, IKU dan IKI, Tepra, SIRUP, LPPD, Ev. Renstra dan Evaluasi RPJMD)			10 dokumen	12 dok	12 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	12 dok	12 dok	12 dok	-
2	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD			B (70)	B (75)	B (80)	B (80)	B (76,57)	B (77)	BB (80)	BB (80)	-
2.1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 paket	6 paket	7 paket	7 paket	6 paket	6 paket	6 paket	15 paket	-
2.2.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 paket	10 paket	8 apket	10 paket	8 paket	10 paket	5 paket	10 paket	-
2.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			45 paket	50 paket	45 paket	50 paket	45 paket	50 paket	50 paket	55 paket	-
2.4.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	4 paket	8 paket	-
2.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-
2.6.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			38 laporan	40 laporan	45 laporan	40 laporan	38 laporan	40 laporan	50 laporan	58 dokumen	-

2.7.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
3	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD			100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	100%	-
3.1.	Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim			10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	6 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	-
3.2.	Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan			12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	-
4	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi keuangan PD			B (70)	B (75)	B (75)	B (75)	B (76,57)	B (77)	BB (80)	BB (80)	-
4.1.	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi			200 dok	200 dok	200 dok	200 dok	299 dokumen	222 dokumen	180 dok	220 dokumen	-
4.2.	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			31 orang	31 org	31 orang	31 orang	31 org	31 org	33 orang	38 orang	-
5	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
5.1.	Jumlah Meubelair yang diadakan			53 unit	7 unit	5 unit	7 unit	53 unit	14 unit	9 unit	23 unit	-
5.2.	Tersedianya peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan			3 unit	8 unit	5 unit	8 unit	3 unit	2 unit	49 unit	10 unit	-
6	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
6.1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	-
6.2.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 unit	8 unit	7 unit	8 unit	10 unit	8 unit	10 unit	10 unit	-
6.3	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	-
6.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 unit	5 unit	10 unit	5 unit	10 unit	5 unit	7 unit	10 unit	-
B	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan			60%	75%	80%	85%	64,43	84%	86%	90%	-
	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan			70%	75%	75%	80%	60,59%	60,59%	70%	72%	-

1	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah Bezzeting/formasi yang diusulkan			75%	90%	90%	90%	66,42	66,42%	70%	72%	-
2	Persentase Data Kepegawaian yang lengkap dan akurat			90%	-	-	-	68%	100%	85%	90%	-
1.1.	Jumlah Peserta yang lulus Seleksi CPNS/PPPK			154 orang	-	-	-	155 orang	-	-	-	-
1.2.	Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan Sumpah Janji ASN			250 orang	-	-	-	0 orang	-	-	-	-
1.3.	Jumlah administrasi pengangkatan CPNS dan PPPK yang terselesaikan			350 orang	-	-	-	0 rang	-	-	-	-
1.4.	Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Tepat Waktu			160 dokumen	-	-	-	188 dokumen	-	-	-	-
1.6	Jumlah ASN yang mengikuti Pembekalan			250 org	-	-	-	89 orang	-	-	-	-
2.1.	Jumlah Fasilitasi kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana			1 lembaga	-	-	-	1 lembaga	-	-	-	-
2.2.	Jumlah aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan, dikelola dan dipelihara			4 aplikasi	-	-	-	4 aplkasi	-	-	-	-
2.3.	Persentase data Kepegawaian di perbaharui			100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
2.4.	Jumlah Kartu Tanda Pengenal ASN di Lingkungan Pemkab. Paser			800 kartu	-	-	-	517 kartu	-	-	-	-
2.5.	Jumlah KARPEG/KARIS/KARSU/TASPEN yang telah diterbitkan di Lingkungan Pemkab. Paser			100 dokumen	-	-	-	403 dokumen	-	-	-	-
2.6	Persentase Rekonsiliasi Data Kepegawaian di lingkungan Pemkab. Paser			100%	-	-	-	100%	-	-	-	-
					-	-	-					-
3	Persentase ASN bekerja sesuai Kompetensi dan Kualifikasi dalam jabatan			70%	75%	80%	85%	62,25%	70%	75%	78%	-

4	Persentase ASN yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan			70%	75%	80%	85%	42,25%	85%	85%	88%	-
4.1.	Jumlah fasilitasi kegiatan Assesment Center yang dilaksanakan			7 kali	-	-	-	3 kali	-	-	-	-
4.2.	Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)			40 org	-	-	-	100 orang	-	-	-	-
4.3.	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Bimbingan Teknis (BIMTEK)			34 org	-	-	-	196 orang	-	-	-	-
4.4.	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI)			100 org	-	-	-	75 orang	-	-	-	-
4.5.	Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas (UDI)			171 org	-	-	-	167 orang	-	-	-	-
4.6.	Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas belajar atau ijin belajar			70 orang	100 orang	-	-	67 orang	78 orang	78 orang	78 orang	-
4.7.	Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu			120 orang	-	-	-	362 orang	-	-	-	-
4.8.	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			10 dokumen	285 orang	-	-	4 orang	285 orang	50 orang	60 orang	-
5	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi			80%	80%	85%	90%	60,59%	70%	72%	75%	-
5.1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			400 dokumen	400 dokumen	-	-	531 dokumen	400 dokumen	370 dokumen	400 dokumen	-
5.2.	Terselenggaranya Rapat Baperjakat			6 rapat		-	-	4 rapat	-	-	-	-
5.3.	Jumlah Calon JPT yang lulus Test Assesment Lelang JPT			24 orang		-	-	24 orang	-	-	-	-
5.4.	Jumlah surat keputusan Kenakan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu			800 dokumen	600 dok	-	-	932 dokumen	600 dokumen	1000 dokumen	1000 dokumen	-

C	Persentase pegawai berkinerja baik			100%	100%	100%	100%	98%	100%	92%	95%	-
1	Persentase ASN dengan nilai SKP baik			75%	80%	80%	80%	99,53%	80%	85%	90%	-
1.1.	Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN			1 dokumen	1 dok	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
1.1	Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi			4.634 SKP	-	-	-	3.732 SKP	-	-	-	-
1.3	Jumlah WL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu			225 wajib lapor	-	-	-	250 wajib lapor	-	-	-	-
1.4	Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN yang dievaluasi			1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-
1.5	Jumlah Kenaikan Gaji Berkala PNS yang terselesaikan tepat waktu			1.600 dokumen	1200 dokumen	1200 dokumen	-	1.793 dokumen	2.212 dokumen	1.200 dok	1.500 dokumen	-
1.6	Jumlah Peraturan Kepala Daerah ttg Penyusunan Standarisasi Tambahan Penghasilan Pegawai / Tunjangan Kinerja yang ditetapkan			1 dokumen	1 dok	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-
1.7	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan SLKS			400 orang	400 orang	400 orang	-	202 orang	400 orang	400 org	400 org	-
1.8	Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan			5 kasus	-	-	-	12 kasus	-	-	-	-
						-	-					-
D	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi			70%	75%	-	77%	56,75%	75%	85%	90%	-
1	Jumlah calon ASN dan ASN yang telah memenuhi Diklat Penjurangan			90%	92%	95%	95%	84,21%	92%	95%	97%	-
1.1.	Jumlah Pejabat yang mendapatkan pendidikan PKP, PKA dan PKN			57 orang	-	-	-	48 orang	-	-	-	-
1.2.	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendapatkan pendidikan LATSAR			136 orang	-	-	-	129 orang	-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- a. Kebutuhan pegawai semakin meningkat sementara formasi kebutuhan yang diusulkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 adalah sebanyak 1.603 formasi jabatan namun yang terpenuhi dalam satu tahun pengadaan hanyalah berkisar 6.23 % saja.
- b. Perubahan peraturan dari Undang-Undang ASN seringkali harus ditindaklanjuti dengan cepat namun belum diimbangi dengan kesiapan daerah, sebagai contoh kebijakan penerapan penilaian kinerja berdasarkan PP 30 tahun 2019 jo PermenPAN RB nomor 8 tahun 2021 sudah mengharuskan penerapan penilaian dengan menggunakan sistem kerja namun belum selaras dengan kesiapan pedoman sistem kerja dan pengimplementasiannya terhadap dokumen perencanaan yang menjadi dasar penilaian kinerja individu
- c. Adanya kebijakan daerah yang terkadang kurang selaras dengan kebijakan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit system. Sebagai contoh sistem pola karir belum menjadi acuan dalam promosi ASN, belum adanya peta kompetensi ASN sebagai dasar mutasi ASN. Pemetaan jabatan ASN berdasarkan

kualifikasi dan kompetensi masih belum optimal diterapkan hal ini dibuktikan dengan data penempatan baru 62.25% yang hampir 50% diisi oleh jabatan fungsional teknis.

- d. Masih rendahnya jumlah kasus pelanggaran disiplin yang dapat terselesaikan yakni sekitar 4 – 5 kasus per tahun, sedangkan persentase penurunan disiplin ASN hanya 0.68% setiap tahunnya.
- e. Masih rendahnya indeks IPA ASN yang secara resmi dari BKN yakni 32,90 sedangkan secara perhitungan mandiri melalui aplikasi simandiri sebesar 46.08.

Meskipun terdapat permasalahan yang cukup mendasar dalam pengembangan kapasitas ASN namun terdapat pula peluang dan tantangan pada BKPSDM Kabupaten Paser yakni :

- a. Pemberlakuan UU nomor 5 tahun 2014 menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya dalam pengembangan kapasitas ASN
- b. Pelaksanaan road map Reformasi Birokrasi
- c. Pelaksanaan atau pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008
- d. Terbukanya Kerjasama dengan berbagai penyelenggara diklat dan pelatihan seperti LAN Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, BPSDM Surabaya Jawa Timur, BPSDM Makassar Sulawesi Selatan, serta kesempatan Kerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Banjarmasin.
- e. Kemajuan teknologi, informasi atau elektronik *e-gouvernement (e-gov)* dalam SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018
- f. Rencana Aksi Bupati Paser dalam meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN melalui peningkatan kapasitas ASN dengan mengacu pada UU nomor 5 tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan dan peluang serta tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser maka isu – isu strategis pelayanan sebagai upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas sarana prasarana, sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian target peningkatan kapasitas ASN

- Meningkatkan kualitas layanan dengan pengembangan teknologi dan informasi
- Mengembangkan sistem Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kerja unit masing-masing perangkat daerah
- Melakukan koordinasi dan sinergitas program kerja secara intensif berbagai pihak dalam rangka implelementasi manajemen ASN berbasis sistem merit
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pembinaan disiplin untuk meningkatkan disiplin pegawai, penyalahgunaan aplikasi e-presensi dan peningkatan prestasi kerja melalui reward dan funishment dalam lingkup Kabupaten.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Paser dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel T-C 31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021-2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				15.645.877.877	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				23.474.541.390	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 nilai	7.588.398.652	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 nilai	8.482.113.004	
			Persentase PD dengan nilai IRS Baik	88 nilai				Persentase PD dengan nilai IRS Baik	88 nilai		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	214.127.500	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	477.689.380	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	144.127.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	194.127.220	
1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (termasuk sektoral dan Cal/K)	12 lap	70.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (termasuk sektoral dan Cal/K)	12 lap	172.728.430	Penambahan kegiatan SPFP (bimtek, honor narasumber, pengadaan belanja modal layer monitor survei kepuasan masyarakat front line + gaji ppt)
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	23.646.460	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	57.942.680	
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	29.044.590	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	78 nilai	5.637.479.158	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	78 nilai	6.187.628.190	
2.1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	200 dok	5.432.823.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	230 dok	244.805.190	Gaji ppt dan honorarium keuangan
2.2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	294.656.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 org	5.942.823.000	Penambahan gaji atas perhitungan beban kerja pada TPP dan aplikasi SIMONA

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	B (80)	505.270.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	70 nilai	504.422.621	
3.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.462.500	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	1.462.203	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 paket	119.693.000	Penambahan untuk penyediaan telepon paraset dan kualitas layanan hotline
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 paket	53.486.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	53.486.016	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	10 paket	14.145.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	4 paket	14.144.802	
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dok	2.997.000	
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	160.241.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	160.241.000	
3.6	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1 dokumen	152.398.000	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	1 dok	152.398.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	100%	938.728.002	Pengadaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	100%	938.728.002	
4.1	Pengadaan Meubel	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Mebeur yang diadakan	5 unit	61.270.000	Pengadaan Meubel	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Mebeur yang diadakan	14 unit	65.681.500	
4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	877.458.002	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	873.046.502	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	100%	7.860.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	100%	7.748.000	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 lap	422.000	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	7.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	7.326.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	100%	241.935.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	100%	240.896.811	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Prizininmas	4 unit	6.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Prizininmas	4 unit	6.198.342	
6.2	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	173.298.500	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 unit	173.298.469	
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	7 unit	51.030.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	10 unit	51.030.000	

6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	10 unit	11.407.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	1 unit	10.370.000	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD		45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kc. Tanah Grogot	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD	5 (80)	45.000.000	
7.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	45.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	45.000.000	
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	80%	6.535.469.475	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	75%	11.577.527.606	
			Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	85%				Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	75%		
			Persentase pegawai berkinerja baik	85%				Persentase pegawai berkinerja baik	100%		
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezatting/formasi yang diusulkan	70%	629.689.150	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezatting/formasi yang diusulkan	70%	1.590.793.796	
			Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	90%				Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan			
1.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	-	-	-	-	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	-	-	
1.2	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 dokumen	5.056.150	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	665.249.398	Penambahan kuota PPPK dan perkiraan masih ada sekitar CPNS
1.3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dokumen	50.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dok	45.600.000	
1.4	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 dokumen	80.000.000	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 dok	54.448.000	
1.5	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 dokumen	100.000.000	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	207.828.406	
1.6	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	40.271.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 lap	66.021.000	
1.7	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dokumen	133.600.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok	177.242.062	Pemeliharaan aplikasi/sistem informasi data pegawai
1.8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	220.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	164.412.000	
2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	80%	750.000.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	80%	882.297.450	

2.1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	400 dok	100.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dok	110.260.200	
2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah pengelola kenaikan pangkat ASN	1 dok	130.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah pengelola kenaikan pangkat ASN	1 dok	200.748.200	
2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600 dok	590.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dok	571.268.000	Pelaksanaan seleksi JPT (5 jabatan)
3	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	80%	4.267.167.325	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	70%	3.213.912.900	
3.1.	Pengelolaan Assessment Center	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dok	10.000.000	Pengelolaan Assessment Center	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dok	403.200.500	
3.2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelola administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dok	3.692.496.575	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pengelola administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dok	7.394.763.650	Penambahan Rencana Aksi Bupati Peningkatan Kompetensi ASN (Diklat teknis fungsional 3.5 M dan Simtek fungsional umum) Total 708 orang termasuk diklat teknis fungsional
3.3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100 org	359.710.750	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	78 org	359.710.750	
3.4	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	400 org	75.000.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	120 org	56.238.000	
3.5	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 org	60.900.000	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1 org	-	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN dengan nilai SKP baik	80%	948.273.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN dengan nilai SKP baik	75%	896.518.460	
4.1.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	5.000.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	82.928.000	
4.2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	240.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	103.963.710	
4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	5.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 lap	92.519.750	
4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1 dokumen	358.273.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1200 org	257.197.000	Tin ASN berprestasi
4.5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1 dokumen	81.000.000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 org	81.208.000	
4.6	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 dokumen	170.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 lap	170.052.500	
4.7	Evaluasi Disiplin	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin	1 laporan	50.000.000	Evaluasi Disiplin	Kc. Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin	1 dokumen	53.130.000	Penambahan sub kegiatan

4.8	Pelayanan Proses Izin Perceriaan Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	1 dokumen	40.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceriaan Pegawai	Kc. Tanah Grogot	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	150 orang	50.380.500	
	Pendidikan dan Pelatihan					Pendidikan dan Pelatihan					
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	77%	1.522.017.750	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	75%	3.694.900.780	
1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase calon ASN dan ASN yang telah lulus memenuhi diklat penjurangan	93%	1.522.017.750	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase calon ASN dan ASN yang telah lulus memenuhi diklat penjurangan	92%	3.694.900.780	
1.1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 laporan	1.522.017.750	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kc. Tanah Grogot	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 lap	3.694.900.780	Peningkatan kapasitas ruang diklat + latar PFPK

Penjelasan perubahan rancangan awal dengan kebutuhan:

Secara garis besar perubahan anggran yang terjadi dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1. Adanya pelaksanaan penilaian mandiri sistem merit, pelaksanaan pendampingan penilaian mandiri MCP dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP memerlukan Pendampingan, Narasumber dan kegiatan sosialisasi untuk peningkatan penilaiannya
- 2. Adanya pelaksanaan penerimaan PPPK dan Pelaksanaan Penerimaan CPNS
- 3. Pelaksanaan seleksi JPT yang akan dilaksanakan sebanyak 5 jabatan
- 4. Pengimplementasian Rencana Aksi Bupati mengenai peningkatan kompetensi ASN menambah anggaran hingga 3.5 M untuk diklat kompetensi teknis dan jabatan fungsional
- 5. Mewujudkan pelaksanaan real untuk reward dan punishment, BKPSDM akan melaksanakan pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SUMber Daya Manusia berdasarkan hal usulan prioritas masyarakat memerlukan penambahan usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik bagi kelompok masyarakat baik yang terkait langsung pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian di lapangan dan pengamatan dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan.

Berikut tabel usulan program dan kegiatan prioritas masyarakat pada tahun 2024 di BKPSDM Kabupaten Paser :

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
			NIHIL		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah memaksimalkan pelayanan di bidang kepegawaian oleh aparatur pemerintah dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Paser. Namun dari segi pelayanan kepegawaian belum optimal, oleh karena itu merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kepada aparatur agar PNS berdisiplin dan professional sehingga pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi.

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik merupakan agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintahan Indonesia tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Adapun pokok yang berhubungan dengan agenda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yakni pada agenda ke tujuh yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari agenda tujuan tersebut terbagi menjadi lima sasaran yang harus diwujudkan dalam tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan demokratis. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Mendorong Investasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Penggunaan APBN

Dari lima sasaran utama tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Paser selaku salah satu pernakgkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan public yaitu “ Reformasi Birokrasi” agar Lembaga semakin sederhana, simple, lincah, perubahan *mindset*, kecepatan pelayanan, kecePatan layanan pemberian ijin dan efisisnesi Lembaga.

Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Paser Menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik yang menjadi lebih professional.

Tabel 3.1.
Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten paser tahun 2024

No.	Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024)	Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2024
1.	Reformasi Birokrasi yaitu Reformasi structural agar Lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, <i>mindset</i> berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin dan efisiensi Lembaga	Meningkatkan kualitas layanan prima
		Meningkatkan kualitas ASN dengan penerapan UU normor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Meningkatkan kualitas manajemen ASN berdasarkan sistem merit
		Melakukan pembinaan dan penegakan peraturan kepegawaian

Sasaran utama Pemeirntah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diteruskan dalam sasaran kinerja BKPSDM Kabupaten Paser tahun 2024 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi khususnya di bidang kepegawaian adalah dengan pengembangan dna pengotpimalan sistem pelayanan serta penerapan manajemen ASN dengan berdasrakan sistem merit sehingga mampu meningkatkan kompetensi, kualifikasi, penempatan sesuai dengan syarat jabatan dan kualitas kinerja ASN untuk membangun SDM aparatur yang berAKHLAK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema pembangunan Kabupaten Paser tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser tahun 2021-2026 yaitu “ Mewujudkan Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”.

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Paser pada RPJPD Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yaitu :

- Periode 5 tahun pertama (2005-2010)
Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan infrastruktur pelayanan dasar
- Periode 5 tahun kedua (2011 – 2015)
Peningkatan kualitas ekonomi berbasis potensi lokal dan penataan wilayah
- Periode 5 tahun ketiga (2016-2020)
Peningkatan tata Kelola pemerintahan, kohesivitas sosial dan pemantapan kualitas pelayanan dasar
- Periode 5 tahun keempat (2021-2025)
Peningkatan daya saing daerah dan keberlanjutan lingkungan

Pada periode tahun 2021-2025 Kabupaten Paser berada pada periode tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Paser. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk peningkatan daya saing daerah yang keberlanjutan lingkungan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dalam mendukung prioritas program pemerintah daerah dalam menciptakan daya saing daerah maka selain meningkatkan pelayanan public dalam rangka reformasi birokrasi juga menciptakan ASN yang andal sebagai penggerak penyelenggara jalannya pemerintahan di daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran perencanaan kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan sasaran

dan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP oleh APIP (BB) 70)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Lainnya

(Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Target B (74)

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Mewujudkan Pengembangan Kapasitas SDM yang Professional, Inovatif dan Berintegrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola manajemen ASN

Indikator :

- Indeks IPA ASN (72,50)
- Persentase Peningkatan penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi (80%)
- Persentase ASN yang telah memiliki sertifikasi kompetensi (80%)

Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- b. Pengembangan Kompetensi ASN
- c. Mutasi dan Promosi ASN
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan Dari analisis

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sebagai mana tersusun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bnagunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Meubelair
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kegawaian ASN

Sub kegiatan :

- Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
- Evaluasi pemberhentian ASN
- Fasilitasi Lembaga profesi ASN
- Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian
- Pengelolaan data kepegawaian
- Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub kegiatan :

- Pengelolaan mutasi ASN
- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Assesment Center
- Pengelolaan Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN
- Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN
- Pembinaan jabatan fungsional ASN
- Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan :

- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
- Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

- Evaluasi hasil penilaian dan kinerja aparatur
- Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
- Evaluasi Disiplin
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sub Kegiatan :

- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah Kabupaten Paser. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024 telah merumuskan program dan kegiatan tersebut yang merupakan hasil penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.

Perumusan program dan kegiatan telah mempertimbangkan kebutuhan program dan kegiatan sehingga banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan RKPD, karena melihat kebutuhan yang bersifat prioritas bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan standar harga.

Rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024 dengan penambahan sub kegiatan serta indikator dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

Pertama, Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian ASN

Sub kegiatan Perumusan bahan kebijakan pengadaan

Alasan :

Sub kegiatan perumusan bahan kebijakan pengadaan mencakup penyusunan dokumen kebijakan teknis pengadaan PNS dan PPPK yang dibutuhkan sebagai dasar SOP bagi penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Kedua, Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub kegiatan Evaluasi Disiplin, dan

Sub Kegiatan Pelayanan proses izin perceraian

Alasan :

Sub kegiatan tersebut diampu oleh sub bidang Disiplin ASN di bawah bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN. Satu-satunya kegiatan pembinaan disiplin yang selama ini dianggarkan dinilai terlalu padat indikator, sehingga diperlukan penambahan sub kegiatan untuk memisahkan sub kegiatan sesuai dengan target usulan.

Evaluasi disiplin dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi penilaian disiplin berdasarkan hasil rekap e-presensi dan masih tingginya pelanggaran disiplin ASN, termasuk kasus perceraian di kalangan ASN.

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2024 yang terdiri atas 3 program yakni 1 program penunjang dan 2 program prioritas utama disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 3.3.
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Paser dan Prakiraan Maju Tahun 2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				23.674.541.390				26.041.995.529
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Persentase PD dengan nilai IRB Baik		72 nilai 60 nilai	8.402.113.004			75 (B) 70 (BB)	9.242.324.304
A.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	Kc. Tanah Grogot	100%	477.689.360	APBD		100%	525.458.318
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kc. Tanah Grogot	5 dok	194.127.220	APBD		5 dok	213.539.942,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	Kc. Tanah Grogot	12 lap	172.728.430	APBD		12 lap	190.001.273,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kc. Tanah Grogot	2 dok	23.846.460	APBD		12 lap	26.231.106,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kc. Tanah Grogot	1 dok	57.942.680	APBD		1 dok	63.736.948,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kc. Tanah Grogot	1 dok	29.044.590	APBD		200 dok	31.949.049,00
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	Kc. Tanah Grogot	70 nilai	6.187.628.190				6.806.391.009
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	Kc. Tanah Grogot	230 dok	244.605.190	APBD		180 dok	269.285.709,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kc. Tanah Grogot	33 org	5.942.823.000	APBD		33 org	6.537.105.300,00
A.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi umum PD	Kc. Tanah Grogot	70 nilai	504.422.621	APBD		70 nilai	554.864.883
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	6 paket	1.482.203	APBD		6 paket	1.608.423,30
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	45 paket	119.693.600	APBD		5 paket	131.662.960,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	60 paket	53.486.016	APBD		60 paket	58.834.617,60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	4 paket	14.144.802	APBD		4 paket	15.559.282,20
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	2 dok	2.997.000	APBD		2 dok	3.296.700,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kc. Tanah Grogot	50 lap	160.241.000	APBD		50 lap	176.265.100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kc. Tanah Grogot	1 dok	152.398.000	APBD		1 dok	167.637.800,00
A.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	Kc. Tanah Grogot	100%	938.728.002	APBD		100%	1.032.600.892
	Pengadaan Meubel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Kc. Tanah Grogot	14 unit	65.681.500	APBD		14 unit	72.249.650,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	64 unit	873.046.502	APBD		60 unit	960.351.152,20
A.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	Kc. Tanah Grogot	100%	7.748.000	APBD		100%	8.522.800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kc. Tanah Grogot	10 lap	422.000	APBD		10 lap	464.200,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kc. Tanah Grogot	12 lap	7.326.000	APBD		12 lap	8.058.600,00
A.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	Kc. Tanah Grogot	100%	240.896.811	APBD		100%	264.986.492
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kc. Tanah Grogot	4 unit	6.168.342	APBD		4 unit	6.818.176,20
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kc. Tanah Grogot	64 unit	173.296.469	APBD		1 unit	190.628.315,90
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kc. Tanah Grogot	10 unit	51.030.000	APBD		10 unit	56.133.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kc. Tanah Grogot	1 unit	10.370.000	APBD		1 unit	11.407.000,00
									-
A.6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD	Kc. Tanah Grogot	B (80)	45.000.000	APBD		B (80)	49.500.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kc. Tanah Grogot	60 orang	45.000.000	APBD		60 orang	49.500.000,00
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	Kc. Tanah Grogot	75%	11.577.527.606	APBD		75%	12.735.289.367
		persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	Kc. Tanah Grogot	75%		APBD		75%	
		Persentase pegawai berkinerja baik	Kc. Tanah Grogot	100%		APBD		100%	

B.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi yang diusulkan	Kc. Tanah Grogot	70%	1.590.798.796	APBD		70%	1.749.878.676
		Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	Kc. Tanah Grogot			APBD			
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Kc. Tanah Grogot	-	-	APBD		1 dokumen	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2 dok	855.248.398			2 dok	940.771.037,80
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 dok	45.600.000	APBD		1 dok	50.180.000,00
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kc. Tanah Grogot	1 dok	54.448.900	APBD		1 dok	59.893.750,00
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kc. Tanah Grogot	1 lembaga	207.828.406	APBD		1 lembaga	228.811.248,60
	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	1 lap	88.021.000	APBD		1 lap	94.823.100,00
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	1 dok	177.242.092	APBD		1 dok	194.966.301,20
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kc. Tanah Grogot	1 dok	164.412.000	APBD		1 dok	180.853.200,00
B.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Kc. Tanah Grogot	80%	882.297.450	APBD		80%	970.527.195
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kc. Tanah Grogot	1 dok	110.280.200	APBD		1 dok	121.308.220,00
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	1 dok	200.748.250	APBD		1 dok	220.823.075,00
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kc. Tanah Grogot	1 dok	571.269.000	APBD		1 dok	628.395.900,00
									-
B.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	Kc. Tanah Grogot	70%	8.213.912.900	APBD		70%	9.035.304.190
	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Kc. Tanah Grogot	1 dok	403.200.500	APBD		1 dok	443.520.550,00
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Kc. Tanah Grogot	1 dok	7.394.763.650	APBD		1 dok	8.134.240.015,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kc. Tanah Grogot	78 org	369.710.750	APBD		78 org	395.881.825,00
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kc. Tanah Grogot	120 org	56.238.000	APBD		120 org	61.861.800,00
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kc. Tanah Grogot	1 org	-	APBD		1 org	-

B.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN dengan nilai SKP baik	Kc. Tanah Grogot	75%	890.518.460			75%	979.570.306
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	1 dok	82.028.000			1 dok	90.230.800,00
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	1 dok	103.993.710	APBD		1 dok	114.393.081,00
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kc. Tanah Grogot	1 lap	92.519.750	APBD		1 lap	101.771.725,00
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kc. Tanah Grogot	1200 org	257.197.000	APBD		1200 org	282.916.700,00
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kc. Tanah Grogot	400 org	81.208.000	APBD		400 org	89.326.800,00
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kc. Tanah Grogot	1 lap	170.052.500	APBD		1 lap	187.057.750,00
	Evaluasi Disiplin	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin	Kc. Tanah Grogot	1 dokumen	53.130.000	APBD		1 dokumen	58.443.000,00
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Kc. Tanah Grogot	150 orang	50.389.500	APBD		150 orang	55.426.450,00
	Pendidikan dan Pelatihan								-
C	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	Kc. Tanah Grogot	75%	3.694.900.780	APBD		75%	4.064.390.858
C.1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase calon ASN dan ASN yang telah lulus memenuhi diklat penjenjangan	Kc. Tanah Grogot	92%	3.694.900.780	APBD		92%	4.064.390.858
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kc. Tanah Grogot	1 lap	3.694.900.780	APBD		1 lap	4.064.390.858,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024 yang selaras dengan rencana strategis tahun 2021-2026 yang telah merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indicator kinerjanya untuk tahun pelaksanaan 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, maka terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Paser tahun 2024 serta review Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2021-2026 serta prioritas usulan kebutuhan dari perangkat daerah;
2. Mendukung pencapaian visi-misi Bupati Paser tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser bertugas dalam bagian pencapaian misi Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang professional, Partisipatif dan Transfaran yang dalam hal ini mengangkat isu strategis peningkatan indeks professionalitas ASN Kabupaten Paser;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan Kabupaten Paser;
4. Penerapan anggaran seoptimal mungkin dilakukan untuk meningkatkan kualitas serapan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan;
5. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara detail rumusan rencana kerja, program dan kegiatan serta pendanaan atau anggaran indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Paser

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT DAN OUTCOME	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	8,279,374,126.00
						Persentase PD dengan IRB baik	75%	
				Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	477,689,380
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	194,127,220
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (termasuk sektoral dan CaLK)	12 lap	172,728,430
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dok	23,846,460
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	57,942,680

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	29,044,590
				Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan PD	B (70)	5,676,805,190.00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi	70 nilai	244,805,190
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	5,432,000,000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD		45,000,000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	45,000,000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian PD	B (70)	504,422,621.00
					Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	1,462,203
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	119,693,600
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	53,486,016
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	14,144,802

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	2,997,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	160,241,000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	152,398,000
				Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan BMD penunjang urusan PD	100%	921,134,610.00
					Pengadaan Meubel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	14 unit	65,681,500
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	855,453,110
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan PD	100%	7,748,000.00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 lap	422,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	7,326,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	100%	214,866,811.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	6,198,342
					Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	173,298,469

					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	25,000,000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10,370,000
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	45	Program Kepegawaian Daerah		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	70%	1,590,798,796.00
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase formasi kebutuhan pegawai yang terpenuhi berdasarkan jumlah bezzeting/formasi yang diusulkan	75%	1,590,798,796.00
						Persentase data kepegawaian yang terupdate/diremajakan	90%	
					Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	1 dokumen	-
					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 dok	855,246,398
					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dok	45,600,000
					Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 dok	54,448,900
					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	207,828,406
					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 lap	164,412,000
					Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 dok	177,242,092
					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dok	86,021,000

				Program Kepegawaian Daerah		Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	70%	8,208,342,400.00
				Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan syarat kompetensi dalam jabatan	70%	8,208,342,400.00
					Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	1 dok	403,200,500
					Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolana administrasi diklat dan sertifikasi ASN	1 dok	7,389,193,150
					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	78 org	359,710,750
					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	120 org	56,238,000
					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1 org	-
				Mutasi dan Promosi ASN		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	80%	882,297,450.00
					Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 dok	110,280,200
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolana kenaikan pangkat ASN	1 dok	200,748,250
					Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 dok	571,269,000
				Program Kepegawaian Daerah		Persentase pegawai berkinerja baik	100%	827,139,460.00
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase ASN dengan nilai SKP baik	75%	827,139,460.00

					Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	82,028,000			
					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	103,993,710			
					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 lap	92,519,750			
					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1200 org	193,818,000			
					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 org	81,208,000			
					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 lap	170,052,500			
					Evaluasi Disiplin	Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin	1 dokumen	50,389,500			
					Persentase ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi	70%	Program Pengembangan SDM		Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	75%	2,923,441,500.00
							Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase calon ASN dan ASN yang telah lulus memenuhi diklat penjenjangan	92%	2,923,441,500.00
					Persentase ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi	70%	Program Pengembangan SDM	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 lap	2,923,441,500

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi kunci untuk mewujudkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan rencana maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan subkegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Penyesuaian target output kegiatan akan mempertimbangkan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

Setiap unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur hendaknya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap rencana yang ditetapkan. Rencana tindak lanjut ke depan antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi lintas sektor untuk melaksanakan kegiatan sesuai target ke depan
2. Meningkatkan konsultasi sumber daya manusia untuk melaksanakan sesuai target yang ditetapkan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kegiatan kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala dan pendampingan teknis
4. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur
5. Meningkatkan komitmen pimpinan atas pelaksanaan kebijakan.

Tana Paser, 17 Juli 2023
Kepala Badan,

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan R.M.Noto Sunardi Telp. (0543) 21072 - 22696 Fax.(0543) 22696
TANAH GROGOT (Kode Pos 76211)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER
NOMOR : 48 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KEPALA BKPSDM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaan lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan pengurangan kegiatan, pergeseran rekening dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan rencana kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 - 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024 ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;
- KEDUA : Naskah Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi tolak ukur terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 02 Juni 2023

Kepala Badan,

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan BKPSDM Kabupaten Paser
Nomor : 48 Tahun 2023
Tanggal : 02 Juni 2023

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024**

- Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM Kabupaten Paser
- Ketua : Sekretaris BKPSDM Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Paser
- Anggota : Fazat Rofi'ah, SE
Muhammad Ihlasul Amal, S.Kom

Kepala Badan,

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan R.M.Noto Sunardi Telp. (0543) 21072 - 22696 Fax.(0543) 22696
TANAH GROGOT (Kode Pos 76211)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER
NOMOR : 49 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KEPALA BKPSDM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu
 - Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V Penutup
- KEDUA : Uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

Kepala Badan,

Drs. SUWITO
Pembina Tingkat I
NIP. 196508081992031019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.